

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

Netty Herawaty<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana secara simultan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana secara parsial faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan terlebih dahulu mengkonversikan skala ordinal ke skala interval melalui metode interval berurutan (*Method of successive interval*). Penelitian ini menggunakan data primer Data primer diperoleh langsung dari instansi yang ada di Kota Jambi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara langsung. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden (hariwijaya dan Triton;2008). Responden pada penelitian ini adalah kepala bagian yang ada di setiap instansi pemerintah yang ada di Kota Jambi. Hasil penelitian memperlihatkan variabel kejelasan sasaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan motivasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja dan hanya variabel motivasi yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel akuntabilitas kinerja.

**Kata kunci:** kejelasan sasaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern, motivasi, akuntabilitas kinerja

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bekerja sama. Setiap negara memiliki visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Salah satu perwujudan reformasi sektor publik adalah dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sementara itu, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah *juncto* UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan sehingga tercipta *good government governance*. Imawan (2002) mengungkapkan secara struktural *good governance* berarti adanya struktur yang *slim* dan *lean* (menghindari kompleksitas jaringan kerja) serta terwujudnya prinsip organisasi modern (pembagian tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, koordinasi yang tidak mematikan inisiatif bawahan). Sementara itu, berdasarkan tataran nilai, *good governance* berarti adanya

efisiensi (pemaksimalan fungsi manajemen pemerintahan) dan efektivitas (menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat dengan metode dan pendekatan yang benar).

Selaras dengan Imawan (2002), Lembaga Administratif Negara (LAN, 2004) menyatakan bahwa *good governance* memiliki dua makna penting. Pertama, *good governance* berarti adanya nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, adanya aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pandangan diatas, maka ada tiga institusi penting dalam menciptakan *good governance* yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Kota Jambi salah satu kota yang menginginkan adanya *good governance* sehingga tercipta kinerja pemerintah yang lebih baik. Jambi sebagai salah satu ibu kota provinsi yang berdaulat dan bernaung di bawah pemerintah Negara Republik Indonesia tentunya berkewajiban untuk

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Pemerintah Daerah Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten berupaya keras untuk terus meningkatkan mutu kinerjanya secara maksimal dan menyeluruh. Berdasarkan hasil audit kinerja keuangan yang dilakukan oleh BPK, terbukti bahwa sejauh ini Kota Jambi belum mampu meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi belum sepenuhnya maksimal. BPK menemukan dugaan penyimpangan anggaran hingga Rp, 2,9 triliun dengan 1.931 kasus dari hasil audit semester I tahun 2013 yang dilakukan untuk wilayah Jambi, yang mana Kota Jambi menduduki urutan ke 10 dengan Rp. 28,9 miliar, 165 kasus ([www.jambi.bpk.go.id](http://www.jambi.bpk.go.id)). Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Mardiasmo (2005) menjelaskan anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik dalam bentuk yang paling sederhana merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai

pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Kesesuaian sasaran ialah kesesuaian antara pandangan manajemen puncak dengan pandangan manajer lini bawah. Aktivitas yang ada dalam kesesuaian sasaran dapat salah arah bila tiap manajer mengasumsikan bahwa apa yang terbaik bagi pusat tanggung jawabnya adalah yang terbaik bagi perusahaan. Manajer harus mempertimbangkan semua sasaran perusahaan dan asumsinya sebagai latar belakang dari semua kegiatan perencanaan. Filosofi standar yang biasa dipegang ialah lebih banyak lebih baik yaitu lebih banyak penjualan, banyak produk, bidang kegiatan, laba dan pengembalian (Siegel, 2000).

Mardiasmo (2005) menjelaskan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal.
4. Anggaran sebagai alat politik.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Menyelenggarakan suatu pengendalian intern yang memadai merupakan suatu tanggung jawab manajemen. Hal ini diungkapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 1994-319.7) dalam

Standar Profesional Akuntan Publik sebagai berikut:

“Penyusunan dan penyelenggaraan struktur pengendalian intern merupakan tanggung jawab penting manajemen. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha akan tercapai, struktur pengendalian intern secara terus menerus memerlukan supervisi dari manajemen untuk menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki dan diubah semestinya sesuai dengan perubahan kondisi yang melingkupinya”.

Pentingnya struktur pengendalian intern diungkapkan oleh Tuanakotta (1982: 95) sebagai berikut: Meskipun wewenang dapat dilimpahkan kepada bawahan tetapi tanggung jawab tetap ada di tangan si pemimpin. Oleh karena itu ia membutuhkan suatu sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan (yang tidak lagi berada langsung di bawah kendalinya), yang memberikan keyakinan padanya bahwa apa yang dilaporkan bawahannya itu benar dan dapat dipercaya, yang dapat mendorong adanya efisiensi usaha dan yang terus menerus memonitor bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijalankan.

Motivasi berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi diartikan sebagai sesuatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan atau mengendalikan perilaku manusia (Yusuf, 2008). Motivasi diartikan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Motivasi dibedakan atas dua:

1. Motivasi Intrinsik yaitu motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri individu tanpa ada rangsangan atau bantuan orang lain
2. Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul akibat rangsangan dari luar individu.

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dengan demikian, mengadopsi pendapat Mahsun diatas, kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah daerah yang tertuang dalam *strategic planning*.

Mahsun (2009) menyebutkan indikator kinerja bahwa indikator kinerja pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Sementara Palmer dalam Herminingsih (2009) menyebutkan bahwa indikator kinerja antara lain: (1) Indikator biaya; (2) Indikator produktifitas; (3) Tingkat penggunaan; (4) Target waktu; (5) volume pelayanan; (6) Kebutuhan pelanggan; (7) Indikator kualitas pelayanan; (8) Indikator kualitas pelanggan dan (9) Indikator pencapaian tujuan.

Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengertian luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu upaya dalam mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang amanah dapat dilakukan mengembangkan sistem pengukuran kinerja entitas pelayanan publik. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002).

Menurut Atkinson dalam Wahyudi (2005) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan pengukuran dari suatu aktivitas ataupun suatu rantai nilai (*value chain*). Dalam hal ini, ukuran kinerja dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu objektif adalah ukuran kinerja yang apabila diuji oleh orang lain akan memberikan hasil yang sama, biasanya bersifat kuantitatif dan subjektif adalah ukuran kinerja yang tidak dapat diuji, biasanya berupa pendapat pribadi dari enilai sehingga tingkat akurasinya rendah.

Penelitian tentang akuntabilitas sudah banyak dilakukan antara lain oleh Oktaviani (2003) melakukan penelitian menguji pengaruh desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial kantor dinas dengan menggunakan sistem pengendalian akuntansi sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya level desentralisasi pengambilan keputusan pada kantor dinas menyebabkan peningkatan penggunaan sistem pengendalian akuntansinya. Selain itu menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan sistem pengendalian akuntansi maka semakin baik kinerja manajerialnya. Temuan lain menunjukkan

bahwa sistem pengendalian akuntansi berperan sebagai variabel intervening pada hubungan desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial.

Darma (2004) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kejelasan sasaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan alat analisis simpel regression analisis yang dilakukan pada kabupaten dan kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan temuan bahwa Dengan tingkat keyakinan 99 % atau  $\alpha$  sebesar 0,01 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini (kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi) berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu juga, dengan tingkat keyakinan 95 % atau  $\alpha$  sebesar 0,05 menunjukkan bahwa variabel pemoderasi dalam penelitian ini (komitmen organisasi) tidak dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial maupun antara sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja manajerial pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah.

Abdullah (2004), meneliti pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisisioner yang dikembangkan oleh Miah dan Mia (1996). Penelitian ini juga menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan sebagai variabel independen lainnya. Hasil penelitian

menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Peneliti sendiri pernah melakukan penelitian tentang akuntabilitas tahun 2008 dengan menggunakan tiga variabel independen pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian memperlihatkan secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi). Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3). Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 66,4%. Berarti sebanyak 33,6% ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti bahwa ada 33,6% variabel lain yang juga mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah maka pada penelitian ini peneliti menambah dua variabel lagi yaitu sistem pengendalian intern dan motivasi. Variabel motivasi diambil berdasarkan replikasi penelitian Soetrisno (2010) yang melakukan penelitian berjudul Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan alat analisis regresi berganda

dan dilakukan pada dinas daerah dan lembaga teknis daerah di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial dengan hasil sedang, sedangkan variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial ditunjukkan perhitungan hasil pengujian statistik bahwa nilai koefisien regresi variabel motivasi adalah 0,039. Nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,306. Menurut teori dari berbagai ahli dikatakan bahwa motivasi yaitu usaha untuk melakukan sesuatu sehingga dapat membawa perubahan yang dapat menentukan langkah seseorang dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai. Penelitian Soetrisno (2010) ini tidak sejalan dengan yang dikatakan oleh ahli tentang pengertian motivasi. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti kembali tentang variabel motivasi ini.

Penelitian tentang sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pernah dilakukan oleh Pilipus (2009) yang menguji pengaruh karakteristik sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah (Studi empiris pada satuan kerja perangkat

daerah Kota Jayapura). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa karakteristik anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial sedangkan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel independen (X) yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan motivasi dan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen (Y)

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh langsung dari instansi pemerintah yang ada di Kota Jambi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara langsung. Wawancara hanya dilakukan untuk menguji dan melengkapi kuesioner yang diberikan kepada para responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah dua orang akuntabilitas publik yang ada di instansi pemerintah yaitu kepala bagian yang ada di dinas tersebut. Pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

Tabel 1 Daftar Nama Instansi Pemerintah Di Kota Jambi

No	Nama Instansi
1	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
2	Dinas Perhubungan
3	Dinas pendidikan
4	Dinas Tata Ruang dan Perumahan
5	Dinas Pora Kebudayaan dan Pariwisata
6	Dinas Pendapatan
7	Dinas kesehatan
8	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
11	Dinas Pekerjaan Umum

12	Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
13	Dinas Pemadam Kebakaran
14	Dinas Koperasi dan UMKM

Sumber: Prov. Jambi (2014)

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	kesesuaian antara pandangan manajemen puncak dengan pandangan manajer lini bawah (Halim:2002)	1. Pusat tanggung jawab 2. Perencanaan 3. Bidang kegiatan 4. Produk 5. Tingkat Pengembalian	Ordinal
Pengendalian Akuntansi (X <sub>2</sub> )	Sistem pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja). (Anthony: 2000)	1. Pusat Kegiatan 2. Ruang Lingkup 3. Maksud 4. Sifat Struktur 5. Sifat Informasi 6. Orang yang terlibat 7. Sumber ilmu 8. Lingkup waktu	Ordinal
Sistem Pelaporan (X <sub>3</sub> )	Laporan anggaran merinci varians-variens prestasi aktual dari anggaran berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dan unit organisasi yang bertanggung jawab. Laporan ini mencakup ramalan tahunan Laporan ini mencantumkan penjelasan mengenai: Sebab varians (penyimpangan) Tindakan yang diambil untuk mengoreksi varians yang tidak menguntungkan Waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi bisa efektif (Anthony: 2000)	1. Penyebab terjadinya penyimpangan 2. Tindakan yang diambil 3. Lamanya waktu koreksi	Ordinal
Pengendalian Intern (X <sub>4</sub> )	Penyusunan dan penyelenggaraan struktur pengendalian intern merupakan tanggung jawab penting manajemen. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha akan tercapai, struktur pengendalian intern secara terus menerus memerlukan supervisi dari manajemen untuk menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki dan diubah semestinya sesuai dengan perubahan kondisi yang melingkupinya". (SPAP: 2011)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penaksiran risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi & Komunikasi 5. Pemantauan	Ordinal
Motivasi (X <sub>5</sub> )	1.Motivasi Intrinsik yaitu motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri individu tanpa ada rangsangan atau bantuan orang lain 2.Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul akibat rangsangan dari	1. Motivasi dari diri sendiri 2. Motivasi dari luar	Ordinal

Akuntabilitas publik (Y)	luar individu (Yusuf:2008)  Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo :2002).	1. Akuntabilitas kejujuran 2. Akuntabilitas hukum 3. Akuntabilitas Proses 4. Akuntabilitas program 5. Akuntabilitas Kebijakan	Ordinal
--------------------------	---	---	---------

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan terlebih dahulu mengkonversikan skala ordinal ke skala interval melalui metode interval berurutan (*method of successive interval*). Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Asumsi multikolinearitas yaitu situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Gujarati (2003:157) multikolinearitas berarti adanya

hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

Asumsi Heteroskedastisitas yaitu data *cross section* mengandung situasi *heterokedastis* karena data tersebut menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Situasi *heterokedastis* akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang, melebihi dari yang semestinya atau menyesatkan. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji F. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon$$

Keterangan:

- $Y$  = Akuntabilitas kinerja
- $\alpha$  = Koefisien Konstanta
- $\beta$  = koefisien Variabel Independen
- $X_{1it}$  = Kejelasan sasaran anggaran
- $X_{2it}$  = Pengendalian Akuntansi
- $X_{3it}$  = Sistem pelaporan
- $X_{4it}$  = Sistem pengendalian intern
- $X_{5it}$  = Motivasi
- $\varepsilon$  = Error Term

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,948 + 0,058 X_1 + 0,153 X_2 - 0,230 X_3 - 0,271 X_4 + 1,883 X_5$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -1,948 memberikan arti bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), sistem pengendalian akuntansi ( $X_2$ ), sistem pelaporan ( $X_3$ ), pengendalian intern ( $X_4$ ) dan motivasi ( $X_5$ ) diasumsikan = 0, maka



- akuntabilitas kinerja secara konstan bernilai sebesar -1,948.
2. Koefisien regresi variabel kejelasan anggaran ( $b_1$ ) sebesar 0,058 memberikan arti bahwa kejelasan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan kejelasan anggaran maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas sebesar 0,058.
  3. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian akuntansi ( $b_2$ ) sebesar 0,153 memberikan arti bahwa sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan sistem pengendalian akuntansi maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 0,153.
  4. Koefisien regresi variabel sistem pelaporan ( $b_3$ ) sebesar 0,230 memberikan arti bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan sistem pengendalian akuntansi maka akan terjadi penurunan akuntabilitas kinerja sebesar 0,230.
  5. Koefisien regresi variabel pengendalian intern ( $b_4$ ) sebesar 0,271 memberikan arti bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan pengendalian maka akan terjadi penurunan akuntabilitas kinerja sebesar 0,271.
  6. Koefisien regresi variabel motivasi ( $b_5$ ) sebesar 1,883 memberikan arti bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan motivasi maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 1,883.

Tabel 3 Hasil Pengolahan Regresi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,928 <sup>a</sup>	,861	,843	,2736658	,861	48,359	5	39	,000	1,628

a. Predictors: (Constant), x5, x1, x4, x3, x2

b. Dependent Variable: y1

Hasil pengolahan data regresi memperlihatkan bahwa variabel  $X_5$  yaitu motivasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah Kota Jambi sedangkan empat variabel lain secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Nilai R sebesar 0,928 pada tabel menunjukkan bahwa korelasi atau keeratan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen terhadap kejelasan anggaran, sistem pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern

dan motivasi sebagai variabel independen adalah kuat karena nilai R menunjukkan angka di atas 0,5. Sementara itu, nilai *Standard Error of Estimate (SEE)* pada tabel adalah sebesar 0,2736658 menunjukkan tingkat kesalahan dalam pengolahan data. Semakin kecil *SEE* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen, karena kesalahan model yang semakin kecil.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai *R Square* atau koefisien determinasi sebesar

0,861 atau 86,1% yang merupakan hasil kuadrat dari nilai R ( $0,928 \times 0,928$ ). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kejelasan anggaran, sistem pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan motivasi) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja) sebesar 86,1%. Sedangkan 13,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,843 lebih kecil dari nilai R Square. Nilai *Adjusted R Square* dianjurkan untuk digunakan pada penelitian yang menggunakan lebih dari dua variabel independen.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Variabel kejelasan sasaran ( $X_1$ ), pengendalian akuntansi ( $X_2$ ), sistem pelaporan ( $X_3$ ), pengendalian intern ( $X_4$ ) dan motivasi ( $X_5$ ), secara simultan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (Y) pada instansi pemerintah Kota Jambi

2. Variabel Motivasi ( $X_5$ ) secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y) pada instansi pemerintah Kota Jambi

3. Variabel kejelasan sasaran ( $X_1$ ), pengendalian akuntansi ( $X_2$ ), sistem pelaporan ( $X_3$ ) dan pengendalian intern ( $X_4$ ) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y) pada instansi pemerintah Kota Jambi. Hal ini bisa diakibatkan karena jumlah responden yang dijadikan sampel sedikit.

### Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah sampel penelitian. Jumlah sampel yang sedikit memberikan kemungkinan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang sampelnya jauh lebih banyak.

2. Bagi perusahaan khususnya instansi pemerintah Kota Jambi agar dapat mempertahankan motivasi yang ada agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyid, Harun. 1994. *Diktat Kuliah Teknik Penerikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: UNPAD.
- Anthony, R.N., dan David W.Young. 1999. *Management Control in Nonprofit Organization*, 6<sup>th</sup> ed. Boston : Irwin Mc Graw-Hill Inc.
- Anthony.R.N., J. Dearden,N. and M. Bedford. 1989. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 6 Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Realibitas dan Validitas: Interpretasi dan Komputasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darma, E. S. 2004. *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada*

- Pemerintah Daerah (studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. 4<sup>th</sup> edition. New York McGraw Hill
- Hansen, Don R., and Maryanne Mowen. 1997. *Management Accounting*, 3<sup>rd</sup> ed. Ohio: South-Western Publishing Co.
- Halim, Abdul, Achmad Tjahjono, Muh Fakhri Husein. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi. Yogyakarta: YKPN.
- Hilmi, Abdullah. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). *KOMPAK*, No.13, Januari-April 2005 Hal: 37-67.
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2002. *Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Miah, N.Z and Mia, L. 1996. *Decentralization, Accounting Control System and Performance of Government Organization : A new Zealand Empirical Study. Financial Accountability and Management*. Financial Accountability and Management. August. hal. 173-189.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oktaviani, Ayu. 2003. Pengaruh Desentralisasi Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Manajerial Kantor Dinas : Sistem Pemngendalian Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris: Otonomi Daerah Kalimantan Selatan). *Tesis*. Program Pascasarjana Diponegoro. Semarang.
- Ramandei, Pilipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). *Tesis*. Program Pascasarjana Diponegoro.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tunggal, AminWijaya. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusuf, Adie.E. 2008. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja. *Implementation of learning organization in management*.